

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
CATURWULAN III
TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu bagian dari Reformasi Birokrasi yakni salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Fokus pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan dilaksanakannya Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap layanan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang menjadi komponen hasil dari pembangunan Zona Integritas (ZI) itu sendiri.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
KUESIONER SURVEI.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan dan Latar Belakang.....	5
C. Kuisioner Survei.....	5
BAB II.....	6
METODOLOGI SURVEI.....	6
A. Kriteria Responden.....	6
B. Metode Pencacahan.....	6
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	7
BAB III.....	9
PENGOLAHAN SURVEI.....	9
A. Analisis Hasil Survei.....	9
B. Tindak Lanjut Hasil Survei.....	10
BAB IV.....	11
DATA SURVEI.....	11
A. Data Responden.....	11
B. Data Dukung Lainnya.....	11

BAB I

KUESIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444), hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Untuk menilai implementasi pemerintahan yang baik tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan survei caturwulan III yaitu pada bulan Oktober 2025 sampai Desember 2025.

B. Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegai korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Kuisioner Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan menggunakan perangkat Google Form yang dapat diakses melalui link <https://bit.ly/481CRHc>. Responden pada SPAK ini diberikan lima pertanyaan terkait persepsi anti korupsi. Sementara itu, pilihan jawaban yang diberikan menggunakan skor dari 1 s.d. 6. Dimana semakin tinggi nilainya menunjukkan persepsi responden semakin setuju/sesuai terhadap pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner survei yang diberikan adalah sebagai berikut.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini?
2. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini?
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini?
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini?
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini?

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan terhadap responden/masyarakat yang mendapat manfaat layanan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, responden merupakan seluruh pihak yang telah selesai menerima pelayanan (100%), responden survei persepsi anti korupsi pada Caturwulan III Tahun 2025 ini sebanyak 10 orang, kriteria pekerjaan responden sebagai berikut:

- Mahasiswa/Pelajar: 5 Responden;
- Anggota Partai Politik: 1 Responden;
- Masyarakat: 2 Responden;
- Aparatur Sipil Negara: 1 Responden;
- Lainnya: 1 Responden.

B. Metode Pencacahan

Survei dilakukan dengan menyampaikan kuesioner melalui surat atau media komunikasi lainnya. Responden akan mengisi tautan survei adalah mitra kerja KPU Provinsi Sumatera Barat.

Tampilan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk)

<p>Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.</p> <p>Deskripsi (opsional)</p>	<p>Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobatan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.</p> <p>Deskripsi (opsional)</p>
<p>Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini *</p> <p>Keterangan Pengisian:</p> <p>1. Sangat Tidak Baik 2. Tidak Baik 3. Kurang Baik 4. Agak Baik 5. Baik 6. Sangat Baik</p> <p>1 2 3 4 5 6</p> <p>Sangat Tidak Setuju <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Sangat Setuju</p>	<p>Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini *</p> <p>Keterangan Pengisian:</p> <p>1. Sangat Tidak Baik 2. Tidak Baik 3. Kurang Baik 4. Agak Baik 5. Baik 6. Sangat Baik</p> <p>1 2 3 4 5 6</p> <p>Sangat Tidak Setuju <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Sangat Setuju</p>

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamouflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).

Deskripsi (opsional)

Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini *

Keterangan Pengisian:

1. Sangat Tidak Baik
2. Tidak Baik
3. Kurang Baik
4. Agak Baik
5. Baik
6. Sangat Baik

Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	Sangat Setuju					
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai)

Deskripsi (opsional)

Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini *

Keterangan Pengisian:

1. Sangat Tidak Baik
2. Tidak Baik
3. Kurang Baik
4. Agak Baik
5. Baik
6. Sangat Baik

Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	Sangat Setuju					
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Gambar 1. Tampilan pertanyaan SPAK

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarluaskan elektronik kuesioner sebagai alat pengumpul data kepada responden penerima layanan KPU Provinsi Sumatera Barat. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

1. Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner.
2. Membangun kuisioner berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun
3. Mengumpulkan seluruh alamat email dan nomor telepon penerima layanan KPU Provinsi Sumatera Barat
4. Membuat database calon responden survei KPU Provinsi Sumatera Barat terdiri atas unsur :
 - Anggota Partai Politik
 - Mahasiswa/Pelajar
 - Masyarakat
 - Aparatur Sipil Negara
 - Lainnya
5. Proses Survei

Pelaksanaan kuesioner dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang dimulai pada Oktober s.d. Desember 2025 terhadap pelayanan KPU Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pada tahun 2025, survei ditutup pada tanggal 20 Desember 2025.
6. Pengumpulan Data

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan menggunakan perangkat

Google Form yang dapat diakses melalui link <https://bit.ly/481CRHc> yang disediakan di meja pelayanan tamu KPU Provinsi Sumatera Barat dan disebarluaskan melalui surat atau media komunikasi lainnya.

7. Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem kuesioner untuk mengetahui perkembangan kuesioner.
8. Pengolahan Data Data diolah dengan tabulasi dan selanjutnya analisis data menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur menggunakan skala 1-6, kemudian dikonversikan menggunakan skala penilaian 1-4, nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Jawaban dibagi dalam 6 (enam) kategori, yaitu:

- 1) sangat setuju, diberi nilai persepsi 4;
- 2) setuju, diberi nilai persepsi 3,33;
- 3) cukup setuju, diberi nilai 2,66;
- 4) kurang setuju, diberi nilai persepsi 2;
- 5) tidak setuju, diberi nilai persepsi 1,33;
- 6) sangat tidak setuju, diberi nilai persepsi 0,66.

Tabel 1.1 Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Bersih Dari Korupsi
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Bersih Dari Korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Cukup Bersih Dari Korupsi
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Bersih Dari Korupsi

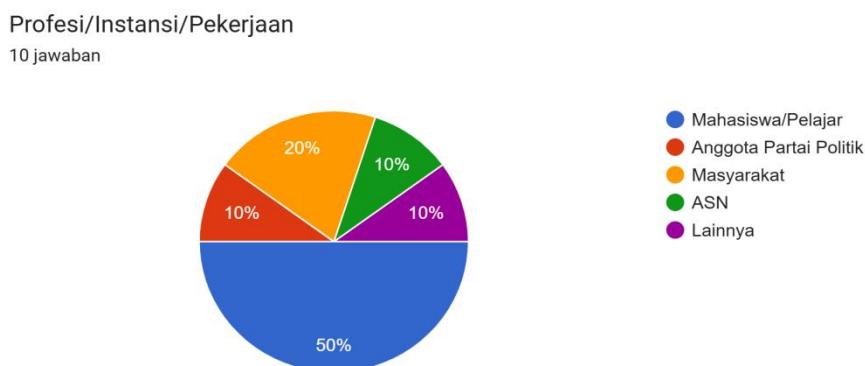
BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Jumlah Responden SPAK

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden persepsi antikorupsi caturwulan III sebanyak 10 Responden, diantaranya 5 Mahasiswa/Pelajar, 1 Anggota Partai Politik, 1 ASN, dan 1 Lainnya.



Gambar 2. Diagram Profesi/Instansi/Pekerjaan Responden SPAK

2. Isian Data Kuesioner dari Responden SPAK

Tabel 1.2 Isian Data Kusioner

Responden	U1	U2	U3	U4	U5
1	6	6	6	6	6
2	6	6	6	6	6
3	6	6	6	6	4
4	5	5	5	5	5
5	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6
7	6	6	6	6	6
8	6	6	5	6	6
9	6	6	6	6	6
10	6	6	6	6	6

Keterangan masing-masing Unsur:

U1 Apakah ada diskriminasi pada pelayanan

U2 Apakah ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan

U3 Apakah ada penerimaan imbalan pelayanan

U4 Apakah ada pungli pada pelayanan

U5 Apakah ada pencaloan/perantara pada pelayanan

3. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi kemudian ditabulasikan sehingga menghasilkan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rekapitulasi Hasil Survei

Persepsi	U1	U2	U3	U4	U5
Jumlah nilai Per unsur	39,33	39,33	38,66	39,33	37,99
Nilai rata-rata Per unsur	3,93	3,93	3,86	3,93	3,79
Nilai rata-rata tertimbang	0,39	0,39	0,38	0,39	0,79
IPK SPAK			3,88		

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilaksanakan, KPU Provinsi Sumatera Barat memperoleh hasil Sangat Baik, diketahui bahwa IPK SPAK secara keseluruhan berada pada angka 3,88, yang mengindikasikan bahwa kerja unit pelayanan KPU Provinsi Sumatera Barat “Bersih Dari Korupsi”. Perolehan hasil yang sangat baik ini merupakan hasil kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menjunjung nilai-nilai Anti Korupsi.

Hasil yang baik ini perlu dipertahankan dengan melakukan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai Anti Korupsi. KPU Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada *Stakeholder* dan seluruh lapisan masyarakat lainnya.

BAB IV

DATA SURVEI

A. Data Responden SPAK

Tabel 1.4 Data Responden

No	Nama	Instansi/Pekerjaan	No.Handphone
1	Dinda Tri Rahayu Putri	Mahasiswa/Pelajar	085766281916
2	Muhammad Lutfi	Mahasiswa/Pelajar	082190386808
3	Linar suknirah laia	Mahasiswa/Pelajar	082387289975
4	Novi Mahdona	Masyarakat	081363061067
5	Alya rahma	Mahasiswa/Pelajar	085384622116
6	Febri Chandra	Lainnya	081374161930
7	Daniel Mulia	Anggota Partai Politik	087752570088
8	M. Anis	ASN	082150075259
9	ismi rahmadani	Mahasiswa/Pelajar	085263988721
10	Gilang Gardhiolla Gusvero	Masyarakat	083898000092

B. Data Dukung Lainnya

Tautan survei SPAK adalah <https://bit.ly/481CRHc>.

Berikut tampilan tautan survei

KUISIONER SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) CATURWULAN III DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT DI TAHUN 2025

Dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner kami berikut ini. Kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas dan integritas pemberian pelayanan pada unit layanan ini. Berilah nilai antara 1 - 6 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak nilai menunjukkan bahwa Bapak/Ibu semakin setuju Bahwa kualitas pelayanan pada unit layanan ini semakin baik, Kami berterima kasih atas partisipasi dan dukungan Bapak/Ibu dalam program kami ini.

Salam Sehat

Gambar 3. Tautan SPAK KPU Provinsi Sumatera Barat

Dengan disusunnya laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk) Caturwulan III Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi serta peningkatan integritas dan kualitas pelayanan. Komitmen perbaikan berkelanjutan akan terus dilakukan guna mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Padang, 22 Desember 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Barat

SEKRETARIAT

Irzal Zamzami